

Judul : Cegah kekerasan anak, komisi VIII ingin KPAI diperkuat
Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Cegah Kekerasan Anak

Komisi VIII Ingin KPAI Diperkuat

Senayan menyangkan berkurangnya anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ini bertolak belakang dengan kebutuhan riil di tengah meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

ANGGOTA Komisi VIII Muhammad Abdul Azis Sefudin mengatakan, kondisi itu harus jadi perhatian serius, karena menyangkut masa depan bangsa. Pasalnya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan isu pinggir, melainkan fondasi pembangunan manusia yang menentukan kualitas generasi mendatang.

"Sangat disayangkan karena setiap tahun angka kekerasan perempuan dan anak itu meningkat. Sedangkan anggaran Kementerian PPPA dan juga KPAI menurun tahun ini," kata Azis

dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).

Politikus PDIP itu menilai, penurunan anggaran berpotensi melemahkan kapasitas negara dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Di saat yang sama, persoalan ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan administratif semata.

Dari data yang dimilikinya, kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak lagi hanya terjadi secara fisik, tapi juga telah merambah ruang digital. Perkembangan teknologi justru membuka ruang baru bagi pelaku



Muhamad Abdul Azis

kekerasan untuk menasar korban secara lebih sistematis.

"Contoh hari ini banyak yang viral adalah *child grooming* dan juga kekerasan anak di digital. Di dapil saya, media sosial jadi ajang saling ejek antar sekolah," ujar legislator Dapil Jabar III tersebut.

Dia mendorong kajian menyeluruh terkait lonjakan kasus kekerasan yang terjadi belakangan. Negara perlu memastikan, apakah peningkatan angka disebabkan oleh keterlambatan penanganan, lemahnya pencegahan, atau justru karena minimnya sosialisasi kebijakan.

Lebih lanjut, dia menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan kebijakan pencegahan. Aspek hukum harus jadi pilar utama untuk menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan melemahnya perlindungan negara. "Kebijakan harus diimbangi dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan berbasis kajian yang solid," ucapnya.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nurwahid menegaskan, persoalan perlindungan

perempuan dan anak tidak dapat ditangani secara parsial. Itu butuh dukungan anggaran memadai untuk menopang kinerja. Hal itu mesti diperjuangkan bersama DPR dengan pihak eksekutif.

Dia mengingatkan, isu perempuan dan anak merupakan fondasi strategis bagi visi Indonesia Emas 2045. Kualitas perlindungan hari ini akan menentukan wajah bangsa dua dekade mendatang. Jika ingin melihat nasib bangsa 20 tahun ke depan, lihatlah apa yang dilakukan hari ini. "Siapa menanam, dia yang menenam," tegasnya.

Kebijakan perlindungan, sambungnya, tidak boleh hanya fokus pada korban, tapi juga menasar akar persoalan dalam keluarga. "Penguatan peran ayah dan tanggung jawab kepala keluarga sangat penting agar perempuan dan anak benar-benar terlindungi," tutup politikus PKS itu. ■ PYB